

Mitos Raja Jawa dan Transformasi Dinasti Politik Studi Kasus Keluarga Jokowi

Eddy Kusnadi¹, Intan Leliana², Rio Septian³, Achmad Haikal⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Komunikasi dan Bahasa, Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta

INFORMASI ARTIKEL

Histori Artikel

Dikirimkan:

13 November 2024

Direvisi:

30 Januari 2025

Diterima:

01 Februari 2025

Diterbitkan:

16 September 2024

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk mengulas Fenomena dinasti yang mengundang kekhawatiran terkait potensi praktik nepotisme, pengaruh negatif pada meritokrasi, dan kemunduran nilai-nilai demokrasi. Fokus Masalah yang diteliti adalah bagaimana mitos raja Jawa memengaruhi persepsi publik terhadap fenomena dinasti politik dalam keluarga Jokowi, serta dampaknya terhadap demokrasi. Teori yang digunakan teori dekokrasi dan representasi politik, untuk melihat bagaimana kekuasaan politik di Indonesia mulai berpindah dari tangan pemimpin ke anggota keluarganya, membentuk semacam struktur politik keluarga. Studi ini juga akan menggunakan pendekatan teori post kolonial untuk memahami bagaimana modernisasi politik Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh elemen-elemen tradisional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, Dimana kajian pustaka sebagai landasan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengalami modernisasi politik, elemen budaya tradisional tetap memainkan peran penting dalam membentuk persepsi dan struktur kekuasaan. Mitos raja Jawa memberikan landasan kultural yang memungkinkan penerimaan sebagian masyarakat terhadap dinasti politik, namun juga menunjukkan adanya ancaman terhadap demokrasi karena kekuasaan politik cenderung terpusat dalam keluarga tertentu.

Kata Kunci

Political
Javanese
Culture
Dynasty

Abstract - This study aims to review the dynasty phenomenon that raises concerns regarding the potential for nepotism practices, negative influences on meritocracy, and the decline of democratic values. The focus of the problem studied is how the myth of the Javanese king influences public perception of the phenomenon of political dynasty in Jokowi's family, and its impact on democracy. The theory used is the theory of democratization and political representation, to see how political power in Indonesia began to shift from the hands of leaders to their family members, forming a kind of family political structure. This study will also use a post-colonial theory approach to understand how Indonesian political modernization is still heavily influenced by traditional elements. The method used in this study is qualitative descriptive, where literature review is the main foundation. The results of the study show that although Indonesia has experienced political modernization, traditional cultural elements still play an important role in shaping perceptions and power structures. Javanese royal myths provide a cultural basis that allows some people to accept political dynasties, but also indicate a threat to democracy because political power tends to be centralized in certain families.

Corresponding Author:

Intan Leliana, Program studi Ilmu Komunikasi, Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta Timur, Indonesia, 13740, Email: intan.ila@bsi.ac.id



PENDAHULUAN

Penduduk Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang masing-masing mempunyai daerah asal dan kebudayaannya sendiri, yang telah berakar sejak berpuluh-puluh tahun yang silam. Corak masyarakat Indonesia yang *Bhinneka Tunggal Ika* bukan lagi dianggap sebagai suatu keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaan, tetapi keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Konsep multikulturalisme merupakan suatu ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara kebudayaan. dilihat dalam kenyataan bahwa populasi paling besar merupakan masyarakat Jawa, dan dalam perkembangannya mereka mengalami persebaran dalam artian merantau hingga ke pelosok-pelosok negeri, hingga dapat dikatakan bahwa masyarakat Jawa sudah tersebar di seluruh Indonesia. Hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kondisi sistem politik bangsa Indonesia. (Noer Sunan et al., 2023).

Dinasti politik telah ada sejak peradaban kuno ketika kekuasaan diwariskan dalam satu keluarga. Contoh paling awal dapat ditemukan di Mesir Kuno dengan Dinasti Pertama (sekitar 3100 SM), di mana raja-raja mewariskan tahta kepada keturunan mereka. Model ini juga terlihat dalam Kekaisaran Cina, seperti Dinasti Qin (221–206 SM) dan Dinasti Han (206 SM–220 M), serta dalam sistem monarki di Eropa, seperti Dinasti Capetian di Prancis (987 M) dan Dinasti Tudor di Inggris (1485–1603). Dalam konteks modern, dinasti politik berkembang dalam sistem demokrasi, di mana anggota keluarga yang sama terus memegang posisi kekuasaan, bukan melalui warisan resmi tetapi melalui pemilihan umum dan kontrol jaringan politik. Di Amerika Serikat, misalnya, terdapat dinasti politik seperti keluarga Kennedy dan Bush. Di Asia, dinasti politik terlihat dalam keluarga Nehru-Gandhi di India sejak 1947, serta keluarga Lee di Singapura dan keluarga Marcos di Filipina. Di Indonesia, fenomena ini tampak pada keluarga Soekarno, keluarga Yudhoyono, dan keluarga Jokowi dalam beberapa tahun terakhir. (Attar, 2024).

Dinasti politik di Indonesia telah menjadi topik yang semakin menarik perhatian dalam beberapa dekade terakhir, terutama dengan munculnya figur-figur politik yang mengklaim warisan kekuasaan. Dalam politik modern, dinasti politik terjadi ketika anggota keluarga dari pemimpin yang sedang atau pernah berkuasa terlibat dalam berbagai jabatan publik, baik melalui pemilihan langsung maupun penunjukan. Dinasti politik Jokowi mengacu pada keterlibatan keluarga Presiden Joko Widodo dalam arena politik, terutama setelah ia menjabat sebagai Presiden Indonesia. Banyak yang memandang ini sebagai bentuk dinasti politik, di mana kekuasaan politik tidak hanya dipegang oleh satu individu, tetapi juga diwariskan atau disebarkan di antara anggota keluarga terdekat. Isu terkait dinasti politik tersebut semakin menguat menjelang pemilihan presiden 2024 karena salah satu calon wakil presiden, yakni Gibran Rakabuming Raka merupakan anak dari presiden Indonesia saat ini, Joko Widodo. Terpilihnya Gibran sebagai calon wakil presiden menuai banyak komentar negatif dari berbagai pihak karena proses terpilihnya Gibran melibatkan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang saat ini berbunyi, "Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. (Iqrimah, 2023).

Masalah dinasti politik di Indonesia, terutama dicontohkan oleh keluarga Presiden Joko Widodo, menimbulkan kekhawatiran yang signifikan mengenai kesehatan demokrasi dan pemerintahan. Munculnya putra Jokowi, Gibran Rakabuming, dan menantu laki-laki, Bobby Nasution, dalam peran politik kunci telah memicu perdebatan tentang nepotisme dan melanggengkan kekuasaan dalam keluarga elit, yang dapat menyebabkan korupsi dan menghambat proses demokrasi (Fatimatuzzahra & Dewi, 2021). Fenomena ini mencerminkan tren yang lebih luas di mana desentralisasi dan demokratisasi secara tidak sengaja memfasilitasi kebangkitan orang-orang kuat lokal, memungkinkan keluarga politik untuk memonopoli kekuasaan di tingkat subnasional (Kenawas, 2018). Selain itu, persistensi nilai-nilai feodalistik dan sistem patronase dalam masyarakat Indonesia memperburuk masalah ini, karena dinasti politik sering memprioritaskan kepentingan keluarga daripada kesejahteraan publik, merusak pluralisme yang penting bagi demokrasi yang dinamis (Ananda, 2023). Dengan demikian, jalinan dinasti politik dengan pemerintahan merupakan tantangan kritis bagi aspirasi demokrasi Indonesia.

Selain Gibran, yang menjadi sorotan lain terkait isu dinasti politik Jokowi yang menguat adalah keterlibatan Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman yang merupakan ipar dari Presiden Jokowi. Isu dinasti politik tersebut banyak dibahas oleh media massa, salah satunya media Tempo. Dalam kanal Youtube

Tempodotcom yang diunggah pada 2 November 2023 dengan judul video "Dinasti Politik Jokowi Menghancurkan Demokrasi | Opini Tempo" berisi tentang opini dari media tempo terkait isu dinasti politik Jokowi yang menempatkan anaknya, Gibran, sebagai calon wakil presiden. (Rahman & Nurhadi, 2024).

Fenomena ini menimbulkan perdebatan tentang dampak dinasti politik terhadap demokrasi. Salah satu contoh paling menonjol adalah adanya spekulasi di kalangan publik terkait ungkapan istilah "Raja Jawa" pada pidato Ketua umum partai Golkar Bahliil Lahadalia saat Munas ke-11 partai Golkar. Frasa "Raja Jawa" seakan-akan menyiratkan kekuasaan besar yang harus dipatuhi tanpa pertanyaan. Sebagai Presiden Indonesia, Jokowi tidak hanya membawa gaya kepemimpinan yang berbeda, tetapi juga menghidupkan kembali simbol-simbol tradisional yang mengaitkan kekuasaan dengan nilai-nilai budaya Jawa.

Mitos raja Jawa memiliki akar yang dalam dalam budaya dan sejarah politik Indonesia. Dalam masyarakat Jawa, raja dianggap sebagai sosok yang memiliki kekuatan gaib dan kekuasaan absolut yang diberikan oleh langit. Hal ini mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemimpin, di mana aspek kultural ini masih kuat meski di tengah sistem politik modern. Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang berasal dari latar belakang sederhana, kini dianggap oleh beberapa kalangan sebagai pewaris simbolik mitos raja Jawa dalam konteks modern. Bersamaan dengan itu, munculnya berbagai anggota keluarganya dalam arena politik nasional dan lokal memunculkan diskusi tentang fenomena dinasti politik. Artikel ini mengeksplorasi bagaimana mitos raja Jawa bertransformasi dan berperan dalam membentuk serta mempengaruhi persepsi publik terhadap dinasti politik keluarga Jokowi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis konstruksi sosial dan budaya yang melandasi mitos raja Jawa dan implikasinya dalam transformasi dinasti politik di Indonesia, khususnya dalam konteks keluarga Jokowi. Dan melihat bagaimana mitos ini digunakan untuk memperkuat legitimasi politik dan kekuasaan serta memahami persepsi publik terhadap fenomena ini. Dalam upaya ini, fokusnya adalah pada: Memahami akar mitos raja Jawa dalam konteks sejarah dan budaya politik Indonesia. Mengkaji bagaimana Jokowi dan keluarganya dipersepsikan dalam kerangka mitos tersebut. Menganalisis dampak dari dinasti politik yang terbentuk dan implikasi jangka panjangnya bagi demokrasi Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengungkap realitas dan dampak dari dinasti politik di Indonesia dari perspektif etika politik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini akan mencakup kajian pustaka sebagai landasan utama. (Widiarsa, 2019) Kajian pustaka adalah ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta informasi baik masa lalu maupun saat ini (Widiarsa, 2019) Kajian pustaka memberikan dasar pengetahuan yang solid dengan menyelidiki literatur yang relevan tentang topik tertentu, membantu mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan dan mengembangkan konsep. (Anggoro, 2014). Pendekatan ini akan menyusun pemahaman yang komprehensif tentang fenomena dinasti politik, baik dari sudut pandang sejarah maupun analisis teoritis yang mendalam (Dwiyanto & Wihardi, 2019). Pertama-tama, kami akan melakukan kajian pustaka yang menyeluruh tentang literatur yang relevan terkait dengan dinasti politik di Indonesia. Kajian ini mencakup buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan sumber-sumber lainnya yang memaparkan berbagai aspek dinasti politik, termasuk asal usul, perkembangan historis, dan dampaknya terhadap demokrasi dan tata kelola negara. Selain itu, analisis konten media massa, khususnya media sosial, digunakan untuk melihat bagaimana narasi dan persepsi publik tentang Jokowi dan keluarganya dibentuk dan dipertahankan.

Dalam menganalisis transformasi mitos raja Jawa dan dinasti politik keluarga Jokowi, penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial dan legitimasi kekuasaan. Teori konstruksi sosial (Kamelia & Nusa, 2018) mengacu pada bagaimana mitos dan narasi dibentuk oleh masyarakat dan digunakan sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan politik. Konsep ini penting dalam menjelaskan bagaimana citra Jokowi sebagai pemimpin yang 'merakyat' dihubungkan dengan nilai-nilai tradisional Jawa yang mengangkatnya sebagai penerus mitos raja Jawa.

Selain itu, teori dekokrasi dan representasi politik Sebagian teori menganggap dinasti politik sebagai ancaman bagi demokrasi karena membatasi kompetisi politik yang sehat dan menghambat meritokrasi. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa dinasti politik bisa bertahan dalam demokrasi karena masyarakat tetap memiliki pilihan untuk memilih atau menolak kandidat dari keluarga politik tertentu. Teori ini digunakan

untuk melihat bagaimana kekuasaan politik di Indonesia mulai berpindah dari tangan pemimpin ke anggota keluarganya, membentuk semacam struktur politik keluarga. Studi ini juga akan menggunakan pendekatan teori post kolonial untuk memahami bagaimana modernisasi politik Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh elemen-elemen tradisional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mitos raja-raja Jawa menjadi bagian integral dari sejarah dan budaya politik Indonesia, yang menggambarkan pemimpin sebagai perwujudan kekuasaan ilahi. Konsep tersebut berasal dari kerajaan awal seperti Majapahit hingga Mataram dalam Islam, dan menggabungkan kekuatan sekuler dan spiritual. Nilai. Menurut pandangan Jawa, raja tidak hanya sekedar pemimpin administratif, tetapi juga pemegang amanat ketuhanan dan dianggap sebagai "penjaga keseimbangan" antara dunia manusia dan alam gaib. Hal ini memperkuat legitimasi raja karena masyarakat menghormatinya sebagai orang yang diutus untuk menjaga keharmonisan kosmis dan mitos serta legendanya menjadi alat politik untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya. Misalnya, menurut legenda, Aji Saka adalah pendiri bahasa tulis Jawa yang tidak hanya membawa peradaban, tetapi juga menunjukkan adanya pemimpin ideal. Tokoh kerajaan dalam sejarah Jawa seringkali dikaitkan dengan berbagai kesaktian dan tidak bisa dijangkau oleh masyarakat awam. Hal ini menciptakan hierarki sosial di mana raja dianggap sebagai tokoh tertinggi dalam budaya Jawa.

Budaya politik mencerminkan jejak konsep kepemimpinan ini. Di zaman modern ini, lambang raja dan pemimpin diberi penghormatan khusus sebagai sosok yang kharismatik dan kharismatik. Dalam tatanan politik Indonesia, beberapa pemimpin bahkan berusaha menyelaraskan diri dengan nilai-nilai tradisional tersebut demi mendapatkan legitimasi. Pemahaman terhadap akar mitos tersebut menunjukkan bagaimana kekuatan budaya lokal Jawa membentuk konsep kekuasaan yang masih relevan hingga saat ini. (Kurniawan et al., 2019).

Mitos Raja Jawa: Tradisi dan Kekuatan yang Sakral

Mitos raja Jawa menggambarkan seorang pemimpin yang tidak hanya berkuasa secara duniawi, tetapi juga memiliki hubungan erat dengan kekuatan spiritual dan ilahi. Dalam budaya Jawa, raja sering dipandang sebagai wakil Tuhan di bumi, dan kedudukannya dianggap sakral. Raja adalah pusat dari kehidupan sosial dan politik, yang diharapkan bisa menjaga keseimbangan alam dan kesejahteraan rakyatnya. Ia tidak hanya bertindak sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai simbol identitas budaya dan spiritual masyarakat.

Sifat keturunan dalam mitos raja Jawa juga memiliki makna yang mendalam. Kekuatan dan kewibawaan seorang raja diyakini mengalir melalui darah dan keturunan, menciptakan suatu garis keturunan yang dianggap memiliki legitimasi untuk memimpin. Hal ini yang kemudian melahirkan konsep dinasti politik, di mana kepemimpinan berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan seringkali dipandang sebagai takdir atau kehendak ilahi.

Secara historis bagaimana mitos raja Jawa, yakni yang menggambarkan kekuasaan absolut dan kharisma seorang raja, diterapkan pada Jokowi sebagai presiden. Meskipun Jokowi dikenal sebagai pemimpin yang berasal dari rakyat biasa, narasi budaya Jawa sering kali menempatkannya dalam konteks mitologi kepemimpinan Jawa, yang mempengaruhi persepsi publik. Dengan demikian, keluarganya—dengan putra dan menantunya yang terlibat dalam politik—dipersepsikan sebagai bentuk transformasi dari mitos raja menjadi dinasti politik modern.

Memahami akar mitos raja Jawa dalam konteks sejarah dan budaya politik Indonesia

Fenomena ini menimbulkan tantangan bagi demokrasi di Indonesia, di mana idealnya kekuasaan politik diperoleh melalui meritokrasi (Agil Sabani et al., 2024) dan bukan karena hubungan keluarga. Namun, mitos raja Jawa memberi landasan kultural yang membuat dinasti politik lebih mudah diterima oleh sebagian masyarakat. Dinasti politik keluarga Jokowi kemudian dipersepsikan sebagai lanjutan dari konsep kepemimpinan yang mengutamakan stabilitas dan kesinambungan, meskipun secara formal sistem politik Indonesia menganut prinsip demokrasi.

Pada artikel ini menunjukkan bahwa meskipun transformasi politik modern terjadi, elemen-elemen tradisional seperti mitos dan budaya politik lokal tetap memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk

dinamika kekuasaan. Pemahaman akan hal ini penting untuk memprediksi bagaimana dinasti politik di Indonesia dapat berkembang di masa depan dan dampaknya terhadap proses demokratisasi di negara ini.

Mengkaji Jokowi dan Keluarganya dalam Kerangka Mitos Raja Jawa: Transformasi Dinasti Politik

Dalam masyarakat Indonesia, terutama di Jawa, terdapat suatu mitos yang sangat kuat mengenai raja dan dinasti kerajaan. Mitos ini mengandung gambaran tentang kekuasaan yang turun-temurun, kedudukan yang sakral, serta hubungan antara raja dengan rakyat yang hampir bersifat religius. Di dalam konteks ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya dapat dilihat sebagai representasi dari transformasi dinasti politik yang berkembang dalam masyarakat modern, meskipun peran mereka terikat oleh dinamika politik kontemporer. Artikel ini berusaha mengkaji bagaimana Jokowi dan keluarganya dipersepsikan dalam kerangka mitos tersebut dan bagaimana mitos raja Jawa telah bertransformasi seiring dengan perjalanan politik keluarga Jokowi.

Menganalisis Dampak Dinasti Politik dan Implikasinya bagi Demokrasi Indonesia

Dinasti politik merupakan fenomena di mana kekuasaan politik dalam suatu wilayah atau lembaga diwariskan atau dipertahankan dalam lingkaran keluarga atau kerabat dekat. Di Indonesia, keberadaan dinasti politik semakin terasa, terutama di tingkat lokal. Meskipun dinasti politik bukan hal baru dan muncul di banyak negara, kehadirannya di Indonesia menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai dampaknya terhadap kualitas demokrasi, transparansi pemerintahan, serta masa depan reformasi politik.

Salah satu dampak utama dari terbentuknya dinasti politik adalah terkikisnya prinsip kesetaraan dalam kompetisi politik. Ketika kandidat yang memiliki hubungan keluarga dengan pemimpin sebelumnya memiliki peluang lebih besar untuk menang, masyarakat luas memiliki akses yang lebih sedikit untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dinasti politik sering kali melanggengkan kekuasaan tanpa mempertimbangkan kompetensi atau integritas calon, menggeser fokus dari meritokrasi menjadi nepotisme. Hal ini dikhawatirkan akan mengurangi kualitas pemimpin yang terpilih dan menghambat regenerasi pemimpin yang lebih kompeten dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Implikasi jangka panjangnya bagi demokrasi Indonesia juga perlu dipertimbangkan. Dinasti politik berpotensi melemahkan kontrol dan keseimbangan kekuasaan, di mana kekuasaan yang terkonsentrasi pada segelintir keluarga atau kelompok akan semakin sulit diawasi oleh pihak lain. Hal ini membuka peluang terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang mengakar lebih dalam. Selain itu, sistem dinasti politik dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem demokrasi itu sendiri. Masyarakat yang merasa bahwa jalur politik sudah "dimonopoli" oleh kelompok tertentu bisa mengalami penurunan motivasi untuk terlibat aktif dalam demokrasi, menyebabkan rendahnya partisipasi politik dan lemahnya daya dorong bagi reformasi.

Namun, mengatasi dinasti politik di Indonesia tidaklah mudah, mengingat banyaknya struktur yang telah tertanam kuat dalam budaya dan sistem politik. Untuk memperkuat demokrasi, diperlukan komitmen untuk meningkatkan pendidikan politik, memperkuat lembaga pengawas, dan menciptakan mekanisme untuk menjaga kompetisi politik yang adil. Reformasi peraturan yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan meritokrasi dalam politik dapat membantu menciptakan iklim demokrasi yang lebih sehat. Dengan begitu, Indonesia dapat menjaga agar demokrasi tetap inklusif dan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat, sekaligus mencegah kekuasaan jatuh ke dalam lingkaran sempit dinasti politik.

Jokowi dan Transformasi Dinasti Politik

Joko Widodo (Jokowi), yang berasal dari latar belakang yang jauh dari dunia politik, awalnya dipandang sebagai sosok yang "dari rakyat untuk rakyat". Namun, seiring berjalannya waktu dan setelah beberapa kali terpilih sebagai presiden, gambaran tersebut mulai berubah. Jokowi mulai dikaitkan dengan perubahan besar dalam dinamika politik Indonesia, termasuk dalam hal pemahaman tentang kepemimpinan dan kekuasaan. Di bawah kepemimpinan Jokowi, kita melihat bagaimana simbol-simbol kepemimpinan yang dahulu lekat dengan kekuasaan tradisional (seperti kedekatan dengan rakyat, pemimpin yang sederhana, dan rendah hati) bertransformasi menjadi bentuk dinasti politik modern.

Dinasti politik dimaknai sebagai upaya penguasa untuk menempatkan keluarga, saudara dan kerabatnya pada jabatan strategis dengan tujuan untuk membangun suatu kerajaan politik dalam pemerintahan. (Virya & Vici, 2023). Dinasti politik dipahami sebagai strategi politik untuk tetap menjaga kekuasaan dengan cara mewariskan kekuasaan kepada orang lain yang masih merupakan kalangan sanak keluarga. (Tundjung & Hidayat, 2018). Tujuannya agar mereka yang menjadi bagian dari sistem dinasti ini akan saling menjaga agar kekuasaannya, baik eksekutif atau legislatif, menjadi lebih kekal. Menempatkan keluarga pada jabatan strategis tentu akan memudahkan penguasa untuk mengontrol dan mengendalikan semua hal yang diperlukan penguasa. (Virya & Vici, 2023)

Jokowi dan keluarganya secara perlahan membangun citra dinasti politik yang kuat. Ini dimulai dengan pemilihan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, yang mencalonkan diri sebagai wali kota Solo, dan dilanjutkan dengan langkah-langkah politik yang lebih besar. Gibran, yang merupakan putra sulung Jokowi, memulai karier politiknya setelah Jokowi menjabat sebagai Presiden, sebuah langkah yang jelas mengindikasikan keberlanjutan kekuasaan dalam lingkaran keluarga Jokowi. Meskipun tidak secara eksplisit menciptakan "kerajaan" seperti dalam mitos Jawa, langkah Gibran dan kemungkinan karier politik anggota keluarga Jokowi lainnya menunjukkan adanya niat untuk mempertahankan kekuasaan dalam satu garis keturunan, sebuah ciri khas dari tradisi dinasti politik.

Mitos dan Persepsi Publik

Dalam persepsi publik, terutama di kalangan masyarakat Jawa, kehadiran Jokowi dan keluarganya dalam dunia politik sering dipandang sebagai bentuk transformasi dari mitos raja Jawa menuju bentuk kekuasaan yang lebih modern namun tetap berbasis pada garis keturunan. Jokowi, yang datang dari latar belakang yang sederhana dan tidak berhubungan langsung dengan kekuasaan tradisional, memberikan kesan bahwa mitos raja Jawa bisa beradaptasi dengan zaman. Ia tidak hanya berjuang melalui narasi populisme, tetapi juga membentuk keluarga yang terlibat dalam politik, yang akhirnya menciptakan citra dinasti politik yang kuat.

Pentingnya peran keluarga dalam politik Indonesia semakin terlihat melalui peningkatan pengaruh Gibran dan adiknya, Kaesang Pangarep, yang turut terlibat dalam berbagai proyek politik dan bisnis. Walaupun mereka tidak langsung menggantikan Jokowi dalam posisi kekuasaan, keterlibatan mereka dalam ruang politik menciptakan persepsi adanya kesinambungan dan transformasi dinasti yang lebih luas. Jokowi, yang pada awalnya dipandang sebagai pemimpin "outsider", kini menjadi pusat dari sebuah dinasti politik baru yang akan memainkan peran penting dalam arah politik Indonesia di masa depan.

Pembentukan dinasti politik tidak dibenarkan keberadaannya dalam negara demokrasi. Hal itu disebabkan karena kekuasaan politik hanya dinikmati oleh segelintir orang saja, sebab semua orang mempunyai hak yang sama untuk berpolitik. Selain itu, kekuasaan politik dapat berbahaya jika proses kekuasaan itu dipertahankan secara terus menerus, apalagi hingga diwariskan kepada keluarga atau kerabatnya. Sejalan dengan pernyataan Lord Acton bahwa kekuasaan itu cenderung disalahgunakan dan kekuasaan yang absolut pasti disalahgunakan (*power tends to corrupt, and absolute power tends to corrupts absolutely*). (Nika, 2021).

Etika politik tidak langsung campur tangan dalam politik praktis; perannya adalah membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologis dapat dilakukan secara objektif. Diskusi utama dalam etika politik melibatkan hukum dan kekuasaan negara. Hukum dipandang sebagai institusi penata masyarakat yang menetapkan norma, sedangkan kekuasaan negara sebagai institusi penata masyarakat yang efektif sesuai dengan struktur kemampuan manusia sebagai individu dan sosial. Prinsip-prinsip etika politik yang menjadi pedoman moral bagi suatu negara meliputi prinsip the Rule of Law, partisipasi demokratis masyarakat, perlindungan HAM berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, serta keterkaitan dengan struktur kebudayaan dan kondisi sosial masyarakat masing-masing.

Fenomena dinasti politik menimbulkan pertanyaan fundamental tentang keadilan politik. Keadilan dalam hal ini berkaitan dengan distribusi yang adil dari kekuasaan politik. Namun, dinasti politik sering kali menciptakan ketimpangan dalam akses terhadap kekuasaan politik, di mana keluarga-keluarga politik mendominasi panggung politik sementara peserta politik lainnya, terutama mereka yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan elite politik, seringkali terpinggirkan atau memiliki akses yang terbatas (Jha, 2020). Hal ini dapat mengganggu prinsip-prinsip demokrasi dan merugikan kesetaraan politik. Praktik dinasti politik

yang dapat ditinjau berasal dari dinasti politik Jokowi, yang dapat diamati sejak tahap penjurangan dan pencalonan Gibran Rakabuming Raka saat mencalonkan diri menjadi Walikota Surakarta. Bahkan, semakin diperkuat dengan proses Gibran menjadi Calon Wakil Presiden RI dari Prabowo Subianto, yang merupakan oposisi dari partai pengusung Gibran pada pilihan wali kota Surakarta tahun 2020, yaitu PDI Perjuangan. Semua peristiwa ini saling terkait dan membentuk gambaran yang menjelaskan motif dinasti politik Joko Widodo (Virya & Vici, 2023)

Joko Widodo menerapkan konsep dinasti politik untuk menjaga fitrahnya sebagai pejabat di Indonesia. Dengan adanya dinasti yang dibangun oleh Jokowi akan memberikan kemudahan bagi Gibran untuk mendapatkan legitimasi dan meningkatkan elektabilitasnya sebagai tokoh publik yang relatif baru. Peran Jokowi dalam membangun citra Gibran sebagai Walikota Surakarta menjadi krusial, terutama dengan kewenangannya dalam menyetujui Proyek Strategis Nasional, yang menjadi salah satu wewenang yang dimiliki oleh Presiden RI (Novilia et al., 2024). Praktik dinasti politik dapat membatasi demokrasi dan memunculkan konflik kepentingan, terutama dalam konteks kenaikan nama Gibran sebagai Calon Wakil Presiden melalui keputusan MK yang dianggap kontroversial. Hal ini menunjukkan bahwa dinasti politik, meskipun memberikan kestabilan dalam kepemimpinan, juga dapat menjadi ancaman bagi demokrasi dan prinsip-prinsip good governance..

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa mitos raja Jawa, yang berakar kuat dalam budaya dan sejarah politik Indonesia, masih berpengaruh dalam era politik modern. Mitos raja Jawa, dengan kekuatan yang sakral dan pewarisan kekuasaan secara turun-temurun, telah bertransformasi dalam konteks politik Indonesia kontemporer melalui keluarga Jokowi. Dari seorang pemimpin yang dikenal sederhana dan dekat dengan rakyat, Jokowi kini berperan sebagai bagian dari dinasti politik yang memanfaatkan simbol-simbol dan legitimasi kekuasaan yang kuat. Dengan demikian, Jokowi dan keluarganya dapat dipandang sebagai representasi dari bagaimana mitos tradisional mengenai kekuasaan dapat bertransformasi dan bertahan dalam bentuk dinasti politik modern di Indonesia. Dalam konteks keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi), mitos ini memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik terhadap fenomena dinasti politik. Jokowi, yang berasal dari latar belakang sederhana, sering kali dianggap sebagai penerus simbolik mitos raja Jawa, terutama dengan keterlibatan keluarganya dalam arena politik, seperti putranya Gibran Rakabuming dan menantunya Bobby Nasution. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi modernisasi politik di Indonesia, elemen budaya tradisional tetap memengaruhi struktur kekuasaan dan penerimaan publik terhadap dinasti politik. Mitos raja Jawa memberikan landasan kultural yang memungkinkan penerimaan terhadap dinasti politik oleh sebagian masyarakat, meskipun praktik ini menimbulkan ancaman terhadap demokrasi, meritokrasi, dan prinsip-prinsip pemerintahan yang adil. Dinasti politik dapat memunculkan konflik kepentingan dan menimbulkan ketimpangan akses kekuasaan, yang berpotensi merusak tatanan demokrasi di Indonesia.

REFERENSI

- Agil Sabani, Naiya Aulia, Nisriinaa Mazaya P, & Savina Niken M. (2024). Pentingnya Implementasi Sistem Meritokrasi Dalam Instansi Pemerintahan Indonesia. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia*, 1(3), 144–152. <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v1i3.333>
- Anggoro, A. D. (2014). MEDIA, POLITIK dan KEKUASAAN. *Jurnal Aristo*, 2(2), 25–52.
- Attar, H. (2024). Dinasti Politik: Definisi, Dampak Negatif, dan Penyebabnya. NU Online. https://nu.or.id/nasional/dinasti-politik-definisi-dampak-negatif-dan-penyebabnya-T3prl?utm_source=chatgpt.com
- Dwiyanto, A., & Wihardi, D. (2019). Analisis Semiotika Charles Sanders Pierce Pada Cover Majalah Tempo Online Edisi 25 Februari – 03 Maret 2019. 2019(March), 1–9.
- Fatimatuzzahra, N., & Dewi, D. S. K. (2021). The Pattern of Joko Widodo's Political Dynasty Practices. *Journal of Local Government Issues*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.22219/logos.v4i1.15407>
- Iqrimah, A. N. (2023). Bersatu Kawal Pemilu. *Berita Satu*. <https://www.beritasatu.com/bersatu-kawal-pemilu/1073494/kronologi-terpilihnya-gibran-rakabuming-raka-jadi-cawapres-prabowo>
- Kamelia, F., & Nusa, L. (2018). Bingkai Media Online Coverage of Indonesia ' s Debt in an Online. *Kanal: Jurnal*

- Ilmu Komunikasi, 7(1), 10–16. <https://doi.org/10.21070/kanal.v>
- Kenawas, Y. C. (2018). The Institutional Foundation of the Emergence of Subnational Political Dynasties in Indonesia. *129(lcsps 2017)*, 267–272. <https://doi.org/10.2991/icpsps-17.2018.59>
- Kurniawan, G. F., Wardo, W., & Sutimin, L. A. (2019). Dominasi Orang-Orang Besar Dalam Sejarah Indonesia: Kritik Politik Historiografi dan Politik Ingatan. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 4(1), 36. <https://doi.org/10.14710/jscl.v4i1.21576>
- Nika, I. (2021). Mencegah Terbentuknya Dinasti Politik melalui Pola Rekrutmen Partai Politik. *I.F.X Renaissance*, 6(3), 562–577.
- Noer Sunan, M. I., Zuhudia, P. G., & Akbar, M. R. (2023). Gaya Kepemimpinan Presiden Jokowi Berdasarkan Filsafat Astabratha Dalam Cerita Pewayangan Wahyu Makutharama Sajian Ki Gatot Wicaksono. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(09), 739–749. <https://doi.org/10.58812/jmws.v2i09.653>
- Novilia, K., Purnama, A., Wardhani, A. C., & Trenggono, N. (2024). Jokowi's Political Dynasties: Impact and its Comparison to Nehru-Gandhi Dynasties. *Journal of Islamic World and Politics*, 7(2), 235–244. <https://doi.org/10.18196/jiwp.v7i2.76>
- Rahman, G., & Nurhadi, J. (2024). Konstruksi Isu Dinasti Politik Jokowi dalam Tayangan Youtube Opini Tempo: Analisis Wacana Kritis. *An-Nas*, 8(1), 1–19. <https://doi.org/10.32665/annas.v8i1.2681>
- Tundjung, & Hidayat, A. (2018). Politik Dinasti dalam Perspektif Ekonomi dari Kerajaan Demak. *Jurnal Alun Sejarah*, 3(1), 1–13. <https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/alursejarah/article/view/2847/2052>
- Virya, A. R. R. A. A. I. C. T., & Vici, V. (2023). Kajian Tentang Dinasti Politik: Realitas dan Dampaknya di Indonesia dari Perspektif Etika Politik. 2023, 1–17. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Widiarsa. (2019). Kajian pustaka (literature review) sebagai layanan intim Pustakawan berdasarkan kepakaran dan minat Pemustaka. *Media Informasi*, 28(1), 111–124. <https://doi.org/10.22146/mi.v28i1.3940>